

Peran Continuous Auditing dan Skeptisme Profesional dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi (Studi pada Inspektorat Kabupaten Bone Bolango)

Sutya Rauf

Universitas Negeri Gorontalo
Sutyarauf290623@gmail.com

Usman Usman

Universitas Negeri Gorontalo
usmandaming@ung.ac.id

Victorson Taruh

Universitas Negeri Gorontalo
Victortaruh07846@Gmail.Com

Abstract

This study aims to examine the effect of continuous auditing and auditor skepticism on the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) supported by information technology in the Government of Bone Bolango Regency. A quantitative approach was applied using the Partial Least Squares (PLS) method to test the hypotheses, with data collected through questionnaires distributed to 74 auditors and financial staff of the Regency Inspectorate as respondents. The findings indicate that continuous auditing has a positive and significant effect on SPIP (t -statistic 2.501; p -value 0.024), and auditor skepticism also shows a positive and significant influence (t -statistic 6.454; p -value 0.000). Information technology further enhances audit effectiveness and promotes transparency and accountability in regional financial management. These results confirm that strengthening SPIP depends on the consistent implementation of continuous auditing, auditors' professional skepticism, and the optimal use of technology. Therefore, the local government, particularly the Inspectorate of Bone Bolango Regency, should enhance staff competencies and maximize the utilization of information technology to improve supervisory effectiveness, reduce the risk of violations, and increase public trust in regional financial governance.

Keywords: *Continuous auditing, Skepticism, Information technology, Internal control system, Local Government*

A. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan pengelolaan sumber daya negara berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan hukum. Melalui SPIP, penggunaan anggaran, aset, serta informasi publik diarahkan agar mendukung pencapaian tujuan pemerintahan secara optimal. Penerapan sistem ini juga mendorong setiap kegiatan instansi dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel karena seluruh prosesnya berlandaskan regulasi yang berlaku. Selain itu, SPIP membantu pemerintah dalam mengenali

potensi risiko, menilai dampaknya, serta mengendalikan hambatan yang dapat mengganggu tercapainya target organisasi.

Dalam konteks pemerintahan digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam memperkuat efektivitas dan integrasi pelaksanaan SPIP. Teknologi ini memungkinkan pengelolaan serta pengawasan sumber daya negara dilakukan secara lebih sistematis, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan TI juga membantu menyederhanakan prosedur administrasi, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan keandalan sistem pengendalian yang digunakan instansi pemerintah. Keunggulan lainnya terletak pada kemampuannya menyediakan pemantauan secara menyeluruh dan waktu nyata, sehingga potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Continuous auditing memiliki keunggulan utama pada kemampuannya melakukan pemantauan secara waktu nyata. Melalui dukungan sistem berbasis teknologi informasi, setiap transaksi dan aktivitas keuangan dapat diawasi secara berkelanjutan tanpa menunggu periode tertentu. Selain meningkatkan ketepatan deteksi, penerapan metode ini juga memperkuat transparansi serta mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan laporan yang dapat diakses secara terbuka oleh publik, masyarakat memiliki kesempatan untuk memantau penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya negara lainnya secara lebih terbuka dan jelas. Secara umum, penerapan teknologi informasi melalui pendekatan *continuous auditing* mampu memperkuat sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah. Dukungan ini menghadirkan mekanisme pengawasan yang lebih cepat, terpadu, dan adaptif sehingga proses pengendalian dapat berjalan lebih efektif serta efisien dalam mendukung tata kelola pemerintahan.

Dalam kegiatan pengawasan, sikap skeptis menjadi unsur penting terutama saat menilai validitas informasi dan efektivitas pengendalian intern di pemerintah daerah. Pendekatan ini menuntut auditor untuk tidak langsung menerima data yang tersedia, melainkan mengujinya secara kritis guna memastikan ketepatan dan keandalannya. Walaupun teknologi seperti *continuous auditing* memungkinkan pemantauan transaksi secara waktu nyata, tanpa pola pikir yang kritis auditor berisiko melewatkan indikasi penyimpangan atau kelemahan sistem yang bersifat tersembunyi.

Badan Pengawas Kabupaten Bone Bolango berfungsi sebagai lembaga pengawas internal di daerah, dengan tujuan memastikan pelaksanaan SPIP (Strategi Nasional untuk Investasi Daerah) berjalan dengan baik. Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum sepenuhnya dioptimalkan, seperti yang terlihat dari temuan BPK (Badan Pengawas Kabupaten Bone Bolango) yang masih belum terungkap oleh auditor internal sebelumnya. Ahmad Luthfi (2023) mencatat beberapa isu, termasuk pengelolaan pungutan yang tidak sesuai dalam

penggunaan aset daerah di berbagai instansi, diantaranya Badan Ketahanan Pangan dan Pertanian, DLH (Dinas Lingkungan Hidup), dan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Isu-isu tersebut mencakup kurangnya kesepakatan, penggunaan aset secara langsung, dan penetapan tarif yang tidak akurat. Selain itu, BPK menemukan bahwa pengeluaran untuk barang dan jasa senilai 1,01 miliar rupee tidak memenuhi ketentuan Peraturan Departemen Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020, yang memberikan pedoman teknis terkait pengelolaan keuangan di daerah.

Fredy Ahmad (2020) menyatakan bahwa berdasarkan hasil audit BPK, terdapat “kekurangan dalam manajemen keuangan daerah.” Salah satu temuan mengungkapkan bahwa saldo yang tersisa dari DAK dan DID per 31 Desember 2020, sejumlah 11.412.298.522,09 rupiah, tidak digunakan sesuai tujuannya. Selain itu, ditemukan sejumlah permasalahan terkait dana BOS, seperti kekurangan dana, penyalahgunaan, dan ketidaksempurnaan catatan akuntansi. BPK juga mencatat adanya pembayaran berlebih untuk perjalanan dinas di beberapa instansi daerah, yang menunjukkan perlunya penguatan sistem pengendalian internal. Observasi yang serupa dilakukan oleh Weni Susanti (2019) dalam analisis IHPS II 2015, yang menyoroti “kelemahan dalam sistem pengendalian internal (SPI) dan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan.” Pelanggaran ini dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan mengurangi pendapatan daerah, serta menggambarkan bahwa administrasi masih belum sepenuhnya efisien dan efektif.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, peneliti merumuskan sebuah kajian dengan judul “Pengaruh Continuous Auditing dan Skeptisme terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui Teknologi Informasi pada Pemerintah Daerah Inspektorat Kabupaten Bone Bolango” sebagai upaya untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern di lingkungan tersebut.

B. KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan berangkat dari adanya hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana agen diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu serta menerima imbalan dari prinsipal. Dalam konteks penelitian ini, hubungan tersebut tercermin antara masyarakat sebagai prinsipal dan Pemerintah Daerah Inspektorat Kabupaten Bone Bolango sebagai agen yang diberi mandat untuk mengelola serta mengawasi sumber daya publik. Interaksi ini membentuk kesepakatan tidak langsung yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tujuan kedua pihak tidak selaras (Arifin, 2005). Pada pemerintahan daerah, masyarakat mempercayakan pengelolaan kepentingan publik kepada pemerintah dengan harapan sumber daya digunakan secara bertanggung jawab dan untuk kesejahteraan bersama (Dewi & Julianto, 2020).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dapat dimaknai sebagai serangkaian mekanisme yang dirancang untuk meningkatkan pencapaian tujuan lembaga pemerintah, khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya, pengawasan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menekankan bahwa pengendalian internal merupakan "proses yang berhubungan dengan setiap aktivitas organisasi dan dilakukan secara berkesinambungan oleh manajemen serta seluruh karyawan" untuk menjamin pelaksanaan aktivitas yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang tepercaya, perlindungan aset pemerintah, serta kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku (Sikumbang, Pakaya dan Blongkod, 2020).

Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) merupakan bidang yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi untuk mendukung berbagai aktivitas organisasi. Cakupannya meliputi sistem informasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, bahasa pemrograman, struktur data, serta proses pengolahan informasi. Secara umum, seluruh bentuk data atau pengetahuan yang ditampilkan secara visual dan didistribusikan melalui media digital termasuk dalam ranah teknologi informasi. Dalam mendukung strategi organisasi, TI berperan dalam mengotomatisasi pekerjaan, menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, memperluas hubungan dengan pelanggan, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui pemanfaatan perangkat teknologi.

Continuous Auditing

Continuous auditing atau audit berkelanjutan adalah metode pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, tidak terbatas pada satu periode tertentu seperti audit konvensional yang umumnya dilaksanakan setahun sekali. Pendekatan ini memungkinkan penilaian terhadap aktivitas keuangan dan operasional dilakukan lebih cepat dan lebih sering, sehingga potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Skeptisme

Skeptisme profesional menurut Standar Audit (SA) 200 merupakan sikap auditor yang senantiasa kritis dan berhati-hati dalam menilai kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan, baik akibat kecurangan maupun kekeliruan yang tidak disengaja. Sikap ini tidak hanya digunakan untuk menguji keandalan informasi, tetapi juga menjadi landasan dalam mengevaluasi bukti audit sehingga auditor dapat menarik kesimpulan yang tepat dan objektif.

Perumusan Hipotesis

- H1: *Continuous Auditing* (X1) berpengaruh positif terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y).
- H2: *Continuous Auditing* (X1) berpengaruh terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi (Z).
- H3: Skeptisme (X2) berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y).
- H4: Skeptisme (X2) berpengaruh terhadap Teknologi Informasi (Z).
- H5: Teknologi Informasi (Z) berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y).
- H6: *Continuous Auditing* (X1) berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y) melalui Teknologi Informasi (Z) sebagai variabel intervening.
- H7: Skeptisme (X2) berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y) melalui Teknologi Informasi (Z) sebagai variabel mediasi.

C. METODE PENELITIAN

Seperti yang dijelaskan Sugiyono (2019), penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbasis positivisme. Desain ini bersifat kausal dan berkonsentrasi pada mengamati bagaimana variabel berinteraksi dan berdampak satu sama lain berdasarkan hipotesis (Sekaran, 2013). Karena jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango kurang dari 100 orang, 74 auditor dari Badan Pengatur Kabupaten ditunjuk sebagai responden. Akibatnya, metode sensus diperlukan. Menurut Sugiyono (2019), data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada auditor dan departemen keuangan. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan tertulis dan responden menjawabnya secara langsung. Selanjutnya, data diproses dengan menggunakan metode modeling equation struktural (SEM), yang didasarkan pada bagian least squares (PLS).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Kecocokan Model Pengukuran (*Outer Model*)

Validitas Konvergen

Tabel 1. Nilai AVE Indikator

| Variabel | Nilai AVE |
|---------------------------------------|-----------|
| Continuuuous Auditing | 0,669 |
| Skeptisme | 0,563 |
| Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | 0,592 |
| Teknologi Informasi | 0,707 |

Indikator yang digunakan memenuhi persyaratan validitas konvergen, dan oleh karena itu cocok untuk digunakan dalam analisis model penelitian, karena hasil pengujian di Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata varians yang diekstrak (AVE) untuk setiap variabel umumnya di atas 0,50.

Validitas Diskrimina

Tabel 2. Nilai Cross Loading

| Indikator | Continuous Auditing(X1) | Skeptisme(X2) | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y) | Teknologi Informasi(Z) |
|-----------|-------------------------|---------------|---|------------------------|
| X1,1 | 0,862 | 0,701 | 0,680 | 0,687 |
| X1,2 | 0,825 | 0,568 | 0,471 | 0,531 |
| X1,3 | 0,853 | 0,687 | 0,571 | 0,660 |
| X1,4 | 0,860 | 0,739 | 0,723 | 0,753 |
| X1,5 | 0,777 | 0,725 | 0,715 | 0,706 |
| X1,6 | 0,853 | 0,684 | 0,679 | 0,707 |
| X1,7 | 0,747 | 0,579 | 0,563 | 0,568 |
| X1,8 | 0,791 | 0,567 | 0,560 | 0,615 |
| X1,9 | 0,787 | 0,656 | 0,620 | 0,563 |
| X2,1 | 0,735 | 0,717 | 0,552 | 0,578 |
| X2,2 | 0,745 | 0,748 | 0,690 | 0,682 |
| X2,3 | 0,639 | 0,744 | 0,551 | 0,627 |
| X2,4 | 0,754 | 0,746 | 0,599 | 0,648 |
| X2,5 | 0,675 | 0,714 | 0,558 | 0,604 |
| X2,6 | 0,614 | 0,699 | 0,542 | 0,578 |
| X2,7 | 0,459 | 0,775 | 0,718 | 0,747 |
| X2,8 | 0,574 | 0,804 | 0,681 | 0,725 |
| X2,9 | 0,483 | 0,742 | 0,616 | 0,666 |
| X2,10 | 0,570 | 0,810 | 0,723 | 0,750 |
| X2,11 | 0,565 | 0,790 | 0,640 | 0,657 |
| X2,12 | 0,544 | 0,709 | 0,642 | 0,682 |
| Y1 | 0,688 | 0,783 | 0,887 | 0,797 |
| Y2 | 0,649 | 0,709 | 0,847 | 0,775 |
| Y3 | 0,744 | 0,822 | 0,875 | 0,859 |
| Y4 | 0,655 | 0,739 | 0,847 | 0,796 |
| Y5 | 0,719 | 0,742 | 0,846 | 0,794 |
| Y6 | 0,657 | 0,671 | 0,792 | 0,743 |
| Y7 | 0,644 | 0,681 | 0,834 | 0,753 |
| Y8 | 0,634 | 0,696 | 0,885 | 0,760 |
| Y9 | 0,542 | 0,615 | 0,795 | 0,711 |
| Y10 | 0,489 | 0,569 | 0,792 | 0,696 |
| Z1 | 0,627 | 0,796 | 0,679 | 0,767 |
| Z2 | 0,383 | 0,539 | 0,587 | 0,646 |
| Z3 | 0,295 | 0,551 | 0,642 | 0,632 |
| Z4 | 0,739 | 0,719 | 0,686 | 0,816 |

| | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------|
| Z5 | 0,720 | 0,751 | 0,717 | 0,829 |
| Z6 | 0,734 | 0,717 | 0,816 | 0,864 |
| Z7 | 0,751 | 0,759 | 0,771 | 0,837 |
| Z8 | 0,528 | 0,580 | 0,723 | 0,726 |

Sumberdata diolahSmartPLS 4 (2025)

Hasil uji cross-loading menunjukkan bahwa, jika dibandingkan dengan konstruk lain, setiap indikator menunjukkan nilai korelasi tertinggi untuk konstruk yang diwakilinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kriteria validitas diskriminan terpenuhi, yang berarti bahwa variabel-variabel dalam model dapat dibedakan satu sama lain dengan jelas.

Reliabilitas

Tabel 3. Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

| Variabel | Cronbach's Alpha | Composite Reliability (rho_a) | Composite reliability (rho_c) | Keterangan |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| Continuous Auditing | 0,911 | 0,930 | 0,948 | Reliabel |
| Skeptisme | 0,908 | 0,924 | 0,939 | Reliabel |
| Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | 0,921 | 0,932 | 0,960 | Reliabel |
| Teknologi Informasi | 0,893 | 0,912 | 0,920 | Reliabel |

Sumberdata diolahSmartPLS 4 (2025)

Pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai alpha Cronbach dan reliabilitas komposit di atas 0,70. Hasil ini menunjukkan konsistensi internal yang memadai, sehingga alat penelitian dapat dianggap reliabel untuk mengukur konstruk individual.

Uji Kecocokan Model Struktural (Inner Model)

R-Square

Tabel 4. Nilai R-Square

| Variabel | R Square | Kuat Hubungan |
|---|----------|---------------|
| Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y) | 0,838 | Kuat |
| Teknologi Informasi(Z) | 0,798 | Kuat |

Sumberdata diolahSmartPLS 4 (2025)

Nilai R-squared 0,67 dianggap kuat, 0,33 sedang, dan 0,19 lemah, menurut Chin (1998) dalam Ghazali (2021:75). Berdasarkan Tabel 4, variabel "Sistem Pengendalian Internal Pemerintah" (Y) memiliki nilai R-squared sebesar 0,838, yang menunjukkan bahwa audit berkelanjutan (X1) dan skeptisisme (X2) dapat menjelaskan 83,8% variasi SPIP, sedangkan 16,2% yang tersisa dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model penelitian. Variabel "Teknologi Informasi" (Z) memiliki nilai R-squared sebesar 0,798, yang menunjukkan bahwa X

F Square

Tabel 5. F Square

| Variabel | Effect Size | Rating |
|--|-------------|--------|
| Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y) | | |
| <i>Continuous Auditing(X1)</i> | 1.928 | Besar |
| <i>Skeptisme(X2)</i> | 1.473 | Besar |
| Teknologi Informasi(Z) | | |
| Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y) | 0.754 | Besar |

Sumberdata diolahSmartPLS 4 (2025)

Menurut Tabel 5, Audit Berkelanjutan (X1) dan Skeptisisme (X2) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sistem pengendalian internal pemerintah (Y). Kedua variabel tersebut juga berdampak besar pada teknologi informasi (Z), baik secara langsung maupun melalui peran SPIP (Y) sebagai variabel perantara dalam model penelitian.

Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Hasil Path Coefficients

| Hipotesis | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | T Statistics (O/STDEV) | P Values |
|---|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Continuous Auditing(X1) -> Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Y) | 0.256 | 0.244 | 0.114 | 2.251 | 0.024 |
| Continuous Auditing(X1) -> Teknologi Informasi(Z) | 0.225 | 0.222 | 0.090 | 2.501 | 0.012 |
| Skeptisme(X2) -> Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Y) | 0.633 | 0.642 | 0.098 | 6.454 | 0.000 |
| Skeptisme(X2) -> Teknologi Informasi(Z) | 0.705 | 0.708 | 0.079 | 8.958 | 0.000 |
| Teknologi Informasi(Z) -> Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Y) | 0.772 | 0.769 | 0.079 | 9.754 | 0.000 |
| Continuous Auditing(X1) -> Teknologi Informasi(Z) -> Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Y) | 0.174 | 0.169 | 0.067 | 2.574 | 0.010 |
| Skeptisme(X2) -> Teknologi Informasi(Z) -> Sistem Pengendalian Intern | 0.544 | 0.546 | 0.093 | 5.867 | 0.000 |

Pemerintah(Y)

Sumber data diolah SmartPLS 4 (2025)

Hasil analisis untuk hipotesis pertama menunjukkan bahwa audit berkelanjutan memiliki efek positif pada sistem pengendalian internal pemerintah. Hasil menunjukkan nilai t sebesar 2,501, lebih besar dari nilai t sebesar 0,1927, dan tingkat signifikansi sebesar 0,024, lebih rendah dari tingkat 0,050. Oleh karena itu, H1 dapat diterima. Hasil pemeriksaan hipotesis kedua juga serupa. Ditunjukkan oleh nilai t sebesar 2,501 lebih besar dari 0,1927 dan tingkat signifikansi sebesar 0,012 lebih rendah dari 0,050. Ini menunjukkan bahwa audit berkelanjutan memiliki dampak positif terhadap teknologi informasi. Akibatnya, H2 diterima.

Hipotesis ketiga menyelidiki bagaimana skeptisisme mempengaruhi sistem kontrol internal pemerintah. Hasil uji menunjukkan bahwa skeptisisme juga memiliki pengaruh besar terhadap teknologi informasi. Nilai t sebesar 8,958, yang lebih besar dari nilai t sebesar 0,1927, dan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih rendah dari 0,050, mendukung hipotesis keempat, yang menunjukkan bahwa skeptisisme juga memiliki pengaruh besar terhadap teknologi informasi. Oleh karena itu, H3 diterima. Hipotesis keempat menunjukkan bahwa skeptisisme juga memiliki pengaruh besar terhadap teknologi

Menurut pengujian hipotesis kelima, sistem kontrol internal pemerintah lebih baik dengan teknologi informasi. Hipotesis keenam juga didukung secara empiris oleh nilai t 9,754, yang melebihi nilai t 0,1927, dan tingkat signifikansi 0,000, yang kurang dari 0,050. Dengan nilai t sebesar 2,574 dan tingkat signifikansi 0,010, yang kurang dari 0,050, audit berkelanjutan menunjukkan bahwa SPIP sebagai variabel intervening dalam teknologi informasi. Oleh karena itu, H6 diterima. Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa skeptisisme terhadap teknologi informasi memengaruhi SPIP; nilai t sebesar 5,867, lebih besar dari nilai t sebesar 0,1927, dan tingkat signifikansi 0,000 menunjukkan penerimaan H7.

Pembahasan

Continuous Auditing Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Continuous Auditing atau Audit Berkelanjutan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Temuan ini memberikan makna bahwa semakin tinggi tingkat penerapan audit berkelanjutan, semakin efektif dan optimal pula kualitas pengendalian intern yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Secara empiris, penelitian ini membuktikan bahwa mekanisme audit yang dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan berbasis teknologi mampu mendorong perbaikan berkelanjutan dalam setiap elemen pengendalian, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan

pengendalian, informasi dan komunikasi, hingga pemantauan. Implementasi audit berkelanjutan tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi kesalahan di akhir periode, melainkan berubah menjadi sistem pencegahan dan pemantauan real-time yang memungkinkan pihak pengawas untuk segera menemukan penyimpangan, mengevaluasi efektivitas prosedur, dan melakukan perbaikan secara langsung. Akibatnya, seluruh komponen SPIP yang menjadi kerangka utama pengelolaan keuangan negara menjadi lebih hidup, berjalan sesuai standar, dan tujuan pengamanan aset, keandalan laporan, serta kepatuhan terhadap peraturan dapat tercapai dengan lebih baik. Hal ini menegaskan bahwa di Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango, penerapan metode audit yang lebih modern dan intensif terbukti menjadi pendorong utama dalam mengoptimalkan fungsi pengendalian intern yang merupakan kewajiban utama setiap entitas pemerintahan.

Secara mendalam, hubungan positif dan signifikan antara audit berkelanjutan dengan sistem pengendalian intern pemerintah dapat dijelaskan dan diperkuat melalui berbagai landasan teori dan konsep yang terdapat dalam literatur akuntansi sektor publik, audit, dan tata kelola. Analisis utama dalam penelitian ini didasarkan pada Teori Keagenan (Agency Theory), sebagaimana dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dan dikembangkan lebih lanjut dalam konteks sektor publik oleh Fama dan Jensen (1983). Dalam perspektif teori ini, hubungan keagenan muncul ketika satu pihak (prinsipal) menunjuk pihak lain (agen) untuk bertindak atas namanya dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Dalam konteks pemerintahan, masyarakat dan negara adalah prinsipal, sedangkan pemerintah daerah dan para pejabat pengelola keuangan adalah agen yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan bersama. Masalah mendasar yang sering muncul dalam hubungan ini adalah adanya asimetri informasi, di mana agen memiliki akses dan pengetahuan yang jauh lebih lengkap mengenai operasional organisasi dibandingkan prinsipal. Kondisi ini memungkinkan terjadinya perilaku oportunistik, yaitu kecenderungan agen untuk bertindak mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya di atas kepentingan publik, yang berujung pada risiko penyimpangan, pemborosan, atau korupsi.

Menurut teori keagenan, untuk meminimalkan biaya keagenan dan risiko penyimpangan tersebut, diperlukan adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian yang memadai (Eisenhardt, 1989). Di sinilah peran audit berkelanjutan menjadi sangat krusial. Berdasarkan pandangan Mousa (2019) dalam bukunya mengenai *Continuous Auditing: Theory and Application*, audit berkelanjutan didefinisikan sebagai mekanisme pengendalian yang dirancang untuk memberikan jaminan menyeluruh dan tepat waktu atas proses manajemen dan pengendalian. Berbeda dengan audit tradisional yang bersifat periodik dan retrospektif, audit berkelanjutan bekerja secara real-time atau mendekati real-time, sehingga mampu menjembatani kesenjangan informasi antara prinsipal dan agen. Dalam kerangka SPIP, tujuan utamanya adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa

tujuan organisasi tercapai melalui kegiatan yang efektif, efisien, pelaporan keuangan yang andal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang merujuk pada kerangka COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), pengendalian intern adalah proses yang dijalankan oleh dewan pengawas, manajemen, dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terkait pencapaian tujuan.

Menurut penjelasan dari Singleton dan Singleton (2019) dalam bukunya *Information Security and Auditing*, penerapan audit berkelanjutan yang didukung oleh teknologi informasi memungkinkan pemantauan terus-menerus terhadap lingkungan pengendalian. Ketika setiap transaksi dan aktivitas dapat diawasi setiap saat, maka penilaian risiko menjadi lebih akurat karena risiko dapat dideteksi sejak dini sebelum berkembang menjadi masalah besar. Selain itu, kegiatan pengendalian seperti otorisasi, verifikasi, dan rekonsiliasi dapat dilakukan secara otomatis dan berulang, yang mengurangi peluang kesalahan manusia atau manipulasi data.

Lebih lanjut, teori pengawasan atau teori pemantauan juga menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem pengendalian sangat bergantung pada frekuensi dan kedalaman pengawasan yang dilakukan. Menurut pendapat Arens et al. (2020) dalam buku *Auditing and Assurance Services*, tujuan utama audit adalah untuk meningkatkan kualitas atau nilai informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Audit berkelanjutan meningkatkan kualitas informasi tersebut karena dilakukan secara terus-menerus, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan tepat waktu. Dalam konteks hasil penelitian di Kabupaten Bone Bolango, hal ini berarti bahwa Inspektorat Daerah yang menerapkan pola audit berkelanjutan tidak lagi menunggu hingga akhir tahun untuk mengetahui apakah ada pelanggaran, melainkan dapat memantau ketaatan terhadap aturan dan efisiensi penggunaan anggaran setiap saat. Hal ini secara langsung memperkuat sistem pengendalian intern, karena adanya jaminan bahwa setiap aktivitas organisasi selalu berada dalam koridor aturan yang berlaku. Tanpa adanya mekanisme pemantauan yang berkesinambungan seperti ini, sistem pengendalian intern hanya akan menjadi dokumen prosedur di atas kertas yang tidak berjalan efektif di lapangan. Oleh karena itu, pengaruh positif yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bukti nyata bahwa audit berkelanjutan merupakan instrumen vital yang mengubah pengendalian intern dari sistem pasif menjadi sistem aktif dan dinamis.

Secara teoritis, keseluruhan kerangka pemikiran dan analisis dalam penelitian ini didasari dan diarahkan oleh Grand Teori: Teori Keagenan (Agency Theory). Teori ini menjadi payung besar dan landasan filosofis utama yang menjelaskan mengapa praktik audit dan pengendalian intern sangat diperlukan dalam organisasi, khususnya di sektor pemerintahan yang memiliki hubungan pertanggungjawaban yang kompleks antara masyarakat, negara, dan pengelola keuangan. Teori

Keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) berangkat dari asumsi bahwa setiap individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri, sehingga dalam hubungan antara prinsipal dan agen akan selalu terdapat potensi konflik kepentingan. Dalam konteks pemerintahan, konflik ini muncul ketika kepentingan pengelola keuangan (agen) berbeda dengan kepentingan publik (prinsipal). Grand teori ini menjadi dasar utama mengapa penelitian ini menguji hubungan antara audit berkelanjutan dan sistem pengendalian intern, karena keduanya lahir sebagai solusi untuk mengatasi masalah asimetri informasi dan perilaku oportunistik tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa audit berkelanjutan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, sedangkan sistem pengendalian intern berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal, dan keduanya saling melengkapi untuk memastikan bahwa mandat yang diberikan oleh prinsipal dilaksanakan dengan benar oleh agen.

Teori Tata Kelola (Governance Theory): Teori ini menjelaskan mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan dalam pengelolaan sumber daya publik, termasuk proses pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan pengawasan. Menurut teori ini, tata kelola yang baik (Good Governance) mensyaratkan adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Audit berkelanjutan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan prinsip transparansi karena memberikan akses informasi secara terus-menerus, sedangkan SPIP adalah kerangka kerja untuk mewujudkan akuntabilitas. Teori ini menegaskan bahwa penerapan audit berkelanjutan akan memperkuat tata kelola organisasi melalui penguatan sistem pengendaliannya (Hoque, 2018).

Teori Pengendalian Manajemen (Management Control Theory): Teori ini berfokus pada bagaimana manajemen memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan teori ini, sistem pengendalian intern dipandang sebagai alat manajemen untuk mengarahkan perilaku anggota organisasi. Audit berkelanjutan masuk sebagai komponen pemantauan yang paling krusial dalam sistem tersebut. Menurut teori ini, efektivitas pengendalian sangat bergantung pada umpan balik yang diterima manajemen; semakin cepat dan sering umpan balik diberikan (melalui audit berkelanjutan), semakin cepat pula perbaikan dapat dilakukan, sehingga semakin efektif pengendalian tersebut (Merchant & Van der Stede, 2017).

Teori Audit Berbasis Teknologi dan Informasi: Teori ini menekankan bahwa evolusi metode audit sangat bergantung pada perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan informasi yang tepat waktu. Dalam pandangan teori ini, audit berkelanjutan bukan sekadar perubahan metode, melainkan perubahan paradigma yang didorong oleh kebutuhan akan jaminan informasi yang real-time. Teori ini menjelaskan bahwa integrasi teknologi dalam audit memungkinkan perluasan ruang

lingkup dan frekuensi pengawasan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pengendalian intern karena seluruh transaksi dapat ditelusuri dan diverifikasi kapan saja (Vasarhelyi et al., 2018).

Teori Kepatuhan (Compliance Theory): Teori ini menjelaskan faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Salah satu faktor penentu kepatuhan adalah kemungkinan terdeteksinya pelanggaran. Audit berkelanjutan meningkatkan persepsi akan kemungkinan terdeteksi karena pengawasan dilakukan terus-menerus, sehingga mendorong perilaku yang lebih patuh dan tertib. Hal ini secara langsung memperkuat tujuan utama SPIP, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Integrasi dari grand teori dan teori-teori pendukung ini membentuk kerangka logis yang kokoh. Teori Keagenan memberikan alasan mengapa hubungan ini ada, teori tata kelola memberikan landasan tujuan, teori pengendalian manajemen menjelaskan mekanisme kerja, dan teori teknologi menjelaskan sarana pelaksanaannya. Keseluruhan teori ini sepakat bahwa audit berkelanjutan merupakan elemen vital yang secara sistematis dan signifikan memperkuat struktur, fungsi, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam kajian ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai hasil penelitian ilmiah terdahulu yang telah dilakukan, baik yang dilakukan di lingkungan pemerintah daerah maupun instansi vertikal. Hubungan tersebut terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu penelitian yang hasilnya sejalan dan mendukung temuan penelitian ini, serta penelitian yang memiliki pandangan atau hasil yang berbeda sehingga memperkaya diskusi ilmiah mengenai efektivitas audit berkelanjutan. Penelitian terdahulu yang hasilnya sejalan dan mendukung temuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Marita Kusuma Wardani (2019) dengan judul penelitian Pengaruh Audit Berkelanjutan Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam penelitiannya yang dilakukan pada lingkungan pemerintah daerah, Wardani menemukan adanya hubungan positif dan signifikan yang kuat antara penerapan audit berkelanjutan dengan tingkat efektivitas SPIP. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa audit berkelanjutan mampu mengurangi risiko kesalahan pencatatan, meningkatkan ketepatan waktu pelaporan, dan memperbaiki kepatuhan peraturan, yang semuanya merupakan indikator utama keberhasilan pengendalian intern. Kesimpulan ini persis sama dengan hasil penelitian di Kabupaten Bone Bolango, di mana ditemukan bahwa pengendalian intern dioptimalkan melalui penerapan audit berkelanjutan. Kedua penelitian ini sama-sama berargumen bahwa sifat audit berkelanjutan yang berkesinambungan dan mendalam memungkinkan adanya perbaikan terus-menerus dalam sistem, sehingga kelemahan-kelemahan dalam pengendalian dapat segera ditutup sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Wardani (2019) juga menegaskan bahwa dalam perspektif teori keagenan, audit berkelanjutan menjadi alat jembatan informasi yang paling efektif

dibandingkan metode audit konvensional, karena memberikan kepastian dan transparansi yang lebih tinggi kepada pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga diperkuat dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Yuniarti (2021) yang berjudul *Peran Audit Berkelanjutan dalam Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern di Sektor Publik*. Penelitian tersebut meneliti bagaimana penerapan sistem audit yang berkesinambungan mempengaruhi lima komponen pengendalian intern versi COSO yang diadopsi dalam SPIP. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan audit berkelanjutan memiliki dampak terbesar pada komponen pemantauan dan penilaian risiko. Penelitian ini mendukung temuan saat ini dengan memberikan bukti bahwa ketika audit dilakukan terus-menerus, kemampuan organisasi dalam mendeteksi risiko penyimpangan menjadi jauh lebih baik, dan mekanisme pemantauan berjalan lebih efektif. Sari dan Yuniarti (2021) juga menegaskan bahwa tantangan utama dalam pengendalian intern pemerintah adalah kelemahan dalam pemantauan, dan audit berkelanjutan adalah solusi strategis untuk menutup celah kelemahan tersebut.

Konsistensi hasil juga ditemukan pada penelitian dari Pratama dan Maharani (2022) yang meneliti tentang *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Audit Berkelanjutan Terhadap Penguatan SPIP*. Penelitian ini menambahkan dimensi teknologi dan menyimpulkan bahwa audit berkelanjutan yang didukung teknologi informasi memberikan dampak positif yang sangat nyata terhadap efektivitas pengendalian intern karena memungkinkan pelacakan data secara akurat dan otomatis. Hasil ini memperkuat argumen dalam penelitian ini bahwa di Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango, optimalisasi pengendalian intern terjadi karena adanya pergeseran dari pola pengawasan pasif menjadi pola pengawasan aktif berkelanjutan.

Di sisi lain, terdapat pula beberapa penelitian terdahulu yang memiliki pandangan atau hasil yang berbeda dan tidak sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, terutama yang menyoroti faktor-faktor pembatas atau kondisi di mana pengaruh tersebut menjadi tidak signifikan atau lemah. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Suhardjo (2020) dengan judul *Analisis Efektivitas Audit Berkelanjutan Terhadap Pengendalian Intern: Studi Pada Daerah dengan Keterbatasan Teknologi*. Dalam penelitiannya, mereka menemukan bahwa secara parsial, audit berkelanjutan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SPIP jika tidak didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni. Argumen yang dikemukakan adalah bahwa konsep audit berkelanjutan bersifat teoretis ideal, namun dalam penerapannya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan anggaran, peralatan, dan keahlian, audit berkelanjutan sulit dijalankan secara murni. Akibatnya, dampaknya terhadap pengendalian intern menjadi tidak terasa atau tidak signifikan. Pandangan ini berbeda dengan hasil penelitian di Kabupaten Bone Bolango yang menunjukkan pengaruh positif dan

signifikan. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa dalam konteks penelitian ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango telah memiliki kesiapan sumber daya dan komitmen manajemen yang baik sehingga konsep audit berkelanjutan dapat diterapkan dengan cukup efektif, berbeda dengan kondisi objek penelitian Rahayu dan Suhardjo (2020) yang berlokasi di daerah dengan keterbatasan sarana prasarana. Perbedaan ini memberikan pemahaman bahwa hubungan positif yang ditemukan dalam penelitian ini bersifat kondisional dan bergantung pada faktor pendukung lain, namun penelitian ini membuktikan bahwa ketika diterapkan dengan baik, dampaknya sangat nyata.

Perbedaan pandangan juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) yang berjudul *Peran Audit Kinerja dan Audit Berkelanjutan dalam Pengendalian Keuangan Daerah*. Dalam penelitiannya, Hidayat berpendapat bahwa audit berkelanjutan hanya berpengaruh pada aspek kepatuhan administrasi dan pelaporan, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap aspek efisiensi dan efektivitas yang merupakan bagian dari tujuan SPIP. Menurut pandangan tersebut, pengendalian intern yang baik lebih banyak ditentukan oleh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan daripada frekuensi audit. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian saat ini yang menyimpulkan bahwa audit berkelanjutan mengoptimalkan seluruh aspek pengendalian. Perbedaan ini menunjukkan adanya perdebatan mengenai ruang lingkup dampak audit berkelanjutan. Namun, penelitian ini memberikan bukti empiris baru bahwa di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango, audit berkelanjutan tidak hanya berfungsi sebagai alat cek administrasi, tetapi telah menjadi bagian integral dari sistem manajemen risiko dan pengendalian yang meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Continuous Auditing Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Teknologi Informasi

Studi ini menunjukkan bahwa audit berkelanjutan memiliki efek yang baik dan signifikan terhadap teknologi informasi. Ini menunjukkan bahwa audit berkelanjutan dapat menghasilkan penggunaan teknologi informasi yang optimal, yang berarti bahwa semakin baik implementasi, semakin efektif teknologi informasi digunakan untuk membantu tugas pemantauan. Hasil ini konsisten dengan temuan Indriyanto (2023), yang juga menyatakan bahwa audit berkelanjutan berdampak pada TI.

Hasil ini dapat dijelaskan dari sudut pandang teori keagenan, yang menyatakan bahwa audit berkelanjutan yang didukung oleh teknologi informasi mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Pemerintahan, masyarakat, atau pemerintah, sebagai prinsipal, membutuhkan sistem pengawasan yang dapat diandalkan bagi para pejabat, sebagai agen, yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan mengelola sumber daya publik. Oleh karena itu, teknologi yang

terintegrasi dalam audit berkelanjutan adalah alat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi publik.

Skeptisme Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Skeptisisme Profesional Auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Temuan ini memberikan makna yang sangat mendasar, yaitu semakin tinggi dan semakin tajam sikap skeptis yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan tugas pengawasannya, maka semakin efektif, kuat, dan andal pula sistem pengendalian intern yang diterapkan di lingkungan organisasi pemerintah. Penelitian ini menegaskan bahwa skeptisisme bukan sekadar sikap mencurigai atau tidak percaya, melainkan merupakan sikap bertanya, menilai, dan melakukan verifikasi secara kritis yang menjadi jantung dari profesi audit. Dalam konteks Inspektorat Daerah maupun instansi pengawasan lainnya, sikap skeptis berperan sebagai penggerak utama kualitas pengawasan. Ketika seorang auditor menerapkan skeptisisme yang memadai, ia tidak akan hanya menerima informasi, dokumen, atau penjelasan dari pihak yang diperiksa secara mentah atau apa adanya, melainkan akan melakukan penelusuran lebih dalam, membandingkan bukti, menilai kewajaran transaksi, dan menguji keabsahan data yang disajikan. Akibatnya, kelemahan-kelemahan dalam prosedur, celah dalam peraturan, hingga potensi penyimpangan yang mungkin tersembunyi dapat terungkap lebih dini. Hal ini secara langsung mendorong pihak manajemen dan pengelola keuangan untuk memperbaiki sistem kerja, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan mematuhi aturan yang berlaku, yang pada akhirnya mengoptimalkan seluruh elemen SPIP, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, hingga informasi dan komunikasi. Dengan demikian, efektivitas pengendalian intern sangat bergantung pada kualitas pengawasan, dan kualitas pengawasan itu sendiri sangat ditentukan oleh seberapa dalam sikap skeptis yang dipegang teguh oleh auditor selama proses pemeriksaan berlangsung. Hasil penelitian ini konsisten dan memperkuat temuan studi yang dilakukan oleh Butar dan Perdana (2017), yang juga menemukan bahwa skeptisisme profesional merupakan faktor penentu keberhasilan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah agar tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Secara mendalam, hubungan positif dan signifikan antara skeptisisme profesional auditor dengan sistem pengendalian intern pemerintah dapat dijelaskan dan diperkuat melalui landasan teori, konsep dasar akuntansi, audit, dan literatur-literatur ilmiah yang relevan. Analisis utama

dalam penelitian ini berakar dari Teori Keagenan (Agency Theory), sebagaimana dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) serta dikembangkan lebih lanjut oleh Fama dan Jensen (1983) dalam konteks hubungan pertanggungjawaban publik. Teori ini menjadi dasar utama untuk memahami mengapa skeptisisme sangat diperlukan dan bagaimana peranannya dalam memperkuat pengendalian. Dalam pandangan teori keagenan, terdapat hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Di sektor pemerintahan, masyarakat dan negara bertindak sebagai prinsipal yang memberikan amanah dan wewenang, sedangkan pemerintah daerah, kepala dinas, dan para pejabat pengelola keuangan bertindak sebagai agen yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan bersama. Masalah mendasar yang tidak dapat dihindari dalam hubungan ini adalah adanya asimetri informasi, di mana agen berada dalam posisi yang memiliki akses, pengetahuan, dan data yang jauh lebih lengkap mengenai kondisi riil organisasi dibandingkan dengan prinsipal. Kondisi ini menciptakan risiko yang nyata, yaitu risiko bahwa agen mungkin tidak bertindak sepenuhnya demi kepentingan prinsipal, melainkan berpotensi memanfaatkan ketidaktahuan prinsipal untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri, kelompok tertentu, atau melakukan manipulasi data dan pelaporan yang tidak sesuai fakta (Eisenhardt, 1989).

Di sinilah letak peran strategis auditor dan pentingnya sikap skeptisisme. Menurut teori keagenan, auditor berfungsi sebagai pihak ketiga independen yang bertugas menjembatani kesenjangan informasi tersebut. Namun, keberadaan auditor saja tidak cukup jika tidak disertai dengan sikap mental yang tepat. Berdasarkan standar audit dan pandangan ahli seperti Arens et al. (2020) dalam bukunya *Auditing and Assurance Services*, Skeptisisme Profesional didefinisikan sebagai sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi kritis terhadap bukti audit. Arens menjelaskan bahwa seorang auditor tidak boleh berasumsi bahwa manajemen adalah orang yang jujur atau sebaliknya tidak jujur, tetapi harus mengakui adanya kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketidakberesan karena sifat hubungan keagenan tersebut. Dengan memiliki sikap skeptis, auditor tidak hanya menerima penjelasan atau dokumen dari agen (pengelola keuangan) begitu saja, melainkan selalu berusaha memverifikasi kebenaran informasi tersebut, meneliti kecukupan dan kewajaran bukti, serta memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses verifikasi dan penelitian yang mendalam inilah yang mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang, yang pada gilirannya memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada prinsipal adalah akurat dan dapat dipercaya.

Keterkaitan langsung dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat dianalisis lebih lanjut melalui kerangka konsep yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mengadopsi kerangka COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission). Pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang dijalankan oleh manajemen dan seluruh pegawai, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat Turner et al. (2018) dalam bukunya *Internal Auditing: Assurance & Advisory Services*, efektivitas sistem pengendalian intern sangat bergantung pada kekuatan pemantauan yang dilakukan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian berjalan sesuai desain dan tetap relevan dengan kondisi saat ini. Di sinilah peran skeptisisme masuk sebagai penguat mutlak. Jika auditor melakukan pemantauan atau audit tanpa sikap skeptis, maka proses pemantauan tersebut hanya akan menjadi kegiatan administratif formalitas saja, di mana kesalahan atau penyimpangan besar bisa saja terlewatkan karena auditor hanya melihat apa yang ditunjukkan oleh pihak yang diperiksa.

Sebaliknya, ketika auditor menerapkan skeptisisme, ia akan melakukan penelusuran hingga ke akar masalah. Misalnya, dalam komponen penilaian risiko, auditor yang skeptis akan lebih peka mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin disembunyikan oleh manajemen. Dalam komponen kegiatan pengendalian, auditor yang skeptis akan menguji apakah prosedur otorisasi dan verifikasi benar-benar dilaksanakan atau hanya ada di atas kertas. Menurut Singleton dan Singleton (2019), sikap kritis ini memaksa pihak manajemen untuk selalu menjaga kualitas pengendaliannya, karena mereka sadar bahwa setiap data yang mereka sampaikan akan diperiksa secara ketat dan mendalam. Dengan kata lain, skeptisisme menciptakan tekanan positif yang membuat sistem pengendalian intern menjadi "hidup", berfungsi, dan dijaga kualitasnya, bukan sekadar dokumen yang diam dan diabaikan. Analisis ini menegaskan bahwa skeptisisme adalah bahan bakar utama yang membuat roda pengawasan berputar dengan baik, sehingga tujuan utama SPIP untuk menjamin tertibnya pengelolaan keuangan negara dapat tercapai secara maksimal.

Secara teoritis, keseluruhan kerangka pemikiran, hubungan antarvariabel, dan analisis dalam penelitian ini didasari dan diarahkan oleh Grand Teori: Teori Keagenan (Agency Theory). Teori ini menjadi payung besar, landasan filosofis, dan pondasi utama yang menjelaskan mengapa hubungan antara skeptisisme auditor dan sistem pengendalian intern itu ada dan sangat krusial. Teori Keagenan yang dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976) berangkat dari asumsi dasar bahwa setiap manusia cenderung mengutamakan kepentingan diri sendiri dan rasional secara ekonomi. Dalam konteks organisasi pemerintahan, asumsi ini berarti bahwa ada potensi nyata bahwa pengelola keuangan (agen) mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan publik (prinsipal). Konflik kepentingan, asimetri informasi, dan ketidakpastian lingkungan adalah

tiga masalah utama dalam hubungan keagenan yang memicu perlunya mekanisme pengawasan dan pengendalian.

Sistem Pengendalian Intern adalah mekanisme internal yang dibangun oleh prinsipal atau manajemen untuk mengarahkan perilaku agen agar tetap berada dalam koridor aturan dan tujuan organisasi. Ini adalah garis pertahanan pertama. Audit dan Skeptisisme adalah mekanisme pengawasan eksternal/independen yang berfungsi memastikan bahwa mekanisme pengendalian internal tersebut benar-benar berjalan efektif dan tidak dimanipulasi oleh agen.

Teori ini memberikan landasan utama mengapa skeptisisme diperlukan. Karena agen memiliki informasi lebih banyak dan berpotensi menyembunyikan fakta, maka auditor sebagai perpanjangan tangan prinsipal harus memiliki sikap tidak mudah percaya, selalu mempertanyakan, dan meneliti informasi tersebut. Tanpa sikap skeptis, auditor akan dengan mudah diperdaya oleh agen, mekanisme pengawasan menjadi lemah, dan sistem pengendalian intern akan runtuh karena tidak ada yang memastikan efektivitasnya. Oleh karena itu, dalam kerangka teori keagenan, skeptisisme dan pengendalian intern adalah dua alat yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan dalam upaya mengurangi biaya keagenan dan melindungi kepentingan prinsipal.

Di bawah payung besar Teori Keagenan tersebut, terdapat beberapa teori pendukung atau teori penjabaran yang berfungsi menjelaskan secara lebih spesifik bagaimana dan mengapa pengaruh tersebut terjadi: Teori Kognitif Sosial (Social Cognitive Theory): Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan harapan yang ada. Dalam konteks ini, sikap skeptis yang ditunjukkan oleh auditor menciptakan lingkungan pengawasan yang ketat. Hal ini mempengaruhi perilaku pengelola keuangan untuk lebih disiplin dan memperkuat pengendaliannya, karena mereka sadar bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa secara kritis. Bandura (1986) menjelaskan bahwa persepsi akan pengawasan yang ketat akan meningkatkan kepatuhan dan kualitas kinerja.

Teori Perspektif Penipuan (Fraud Triangle Theory): Dikembangkan oleh Cressey (1953), teori ini menjelaskan bahwa penipuan terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Sistem pengendalian intern bertujuan menutup kesempatan, sedangkan skeptisisme auditor bertujuan mendeteksi adanya indikasi tekanan atau rasionalisasi yang mungkin tersembunyi. Teori ini menjelaskan bahwa skeptisisme memungkinkan auditor untuk melihat tanda-tanda bahaya yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata, sehingga pengendalian intern dapat diperbaiki untuk menutup celah penipuan tersebut.

Teori Agensi Pengawasan dan Jaminan: Teori ini secara khusus membahas peran audit dalam memberikan jaminan kepercayaan. Menurut teori ini, nilai dari sebuah audit tidak terletak pada pelaksanaannya saja, tetapi pada keyakinan yang diberikan kepada pihak prinsipal. Keyakinan atau

jaminan ini hanya bisa tercipta jika audit dilakukan dengan standar kualitas tinggi, dan standar kualitas tersebut sangat bergantung pada tingkat skeptisisme profesional yang diterapkan auditor (DeAngelo, 1981).

Teori Sistem Pengendalian Manajemen: Teori ini memandang organisasi sebagai serangkaian sistem yang saling berhubungan. Pengendalian intern adalah sistem utamanya, dan audit dengan sikap skeptis adalah mekanisme umpan baliknya. Umpan balik yang kritis dan objektif (hasil dari sikap skeptis) sangat diperlukan agar sistem pengendalian dapat diperbaiki dan disesuaikan secara terus-menerus menuju efektivitas yang maksimal (Otley, 1999).

Integrasi dari grand teori dan teori-teori pendukung ini membentuk kerangka logis yang kokoh dan tidak terbantahkan secara ilmiah. Keseluruhan teori sepakat bahwa skeptisisme profesional adalah inti dari kualitas audit, dan kualitas audit adalah penentu utama efektivitas sistem pengendalian intern. Tanpa skeptisisme, pengendalian intern hanya akan menjadi dokumen kosong yang tidak memiliki kekuatan pelaksanaan.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam kajian ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai hasil penelitian ilmiah terdahulu yang telah dilakukan, baik yang berfokus pada peran auditor, perilaku audit, maupun efektivitas pengendalian intern di sektor publik. Hubungan tersebut terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu penelitian yang hasilnya sejalan dan mendukung temuan penelitian ini, serta penelitian yang memiliki pandangan atau hasil yang berbeda sehingga memperkaya diskusi ilmiah mengenai peran sikap skeptis dalam pemeriksaan.

Penelitian terdahulu yang hasilnya sejalan dan mendukung temuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Butar dan Perdana (2017) dengan judul *Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Penelitian ini menjadi rujukan utama dan bukti empiris yang paling relevan. Dalam penelitian mereka, Butar dan Perdana menemukan bukti yang sangat kuat bahwa sikap skeptis auditor memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja pengendalian intern. Kesimpulan utama dari penelitian tersebut menyatakan bahwa skeptisisme membantu sistem pengendalian internal pemerintah berjalan lebih baik karena auditor yang bersikap kritis mampu mengungkap kelemahan-kelemahan yang tersembunyi dan memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat sasaran. Penelitian tersebut juga menegaskan pandangan teori keagenan, di mana skeptisisme berfungsi sebagai alat utama untuk mengurangi asimetri informasi dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai aturan. Hasil penelitian saat ini persis sama dan mengkonfirmasi kembali temuan tersebut di lokasi dan objek penelitian yang berbeda, yaitu di Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango, sehingga memperkuat validitas generalisasi bahwa hubungan ini berlaku umum di lingkungan pemerintahan.

Kedua penelitian ini sama-sama berargumen bahwa skeptisisme bukan sekadar sifat pribadi, melainkan kewajiban profesi yang berdampak langsung pada kualitas tata kelola keuangan negara.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga diperkuat dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Setiawan (2019) yang berjudul *Peran Skeptisisme Profesional dalam Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Dalam penelitiannya, mereka meneliti bagaimana sikap mental auditor mempengaruhi proses identifikasi risiko dan penilaian pengendalian. Hasilnya menunjukkan bahwa auditor yang memiliki tingkat skeptisisme tinggi cenderung lebih teliti dalam memeriksa dokumen, lebih peka terhadap anomali data, dan lebih berani menindaklanjuti hal-hal yang tidak wajar. Hal ini secara langsung berdampak pada kekuatan pengendalian intern, karena setiap kelemahan yang ditemukan akan segera diperbaiki oleh manajemen. Penelitian ini mendukung temuan saat ini dengan memberikan bukti empiris bahwa skeptisisme meningkatkan kualitas pengawasan, dan kualitas pengawasan adalah prasyarat mutlak bagi efektivitas pengendalian.

Konsistensi hasil juga ditemukan pada penelitian dari Wibowo dan Ningsih (2021) yang meneliti tentang *Determinan Efektivitas SPIP: Peran Kompetensi dan Skeptisisme Auditor*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di antara berbagai faktor yang mempengaruhi SPIP, skeptisisme memiliki pengaruh yang paling dominan dan kuat. Mereka berpendapat bahwa walaupun aturan dan sistem prosedur sudah dibuat sangat baik, semuanya akan percuma jika auditor yang bertugas memeriksa tidak memiliki sikap kritis, mudah percaya, atau hanya berfokus pada penyelesaian administrasi semata. Hasil ini sangat mendukung pembahasan dalam penelitian ini yang menempatkan sikap skeptis sebagai elemen kunci yang mengoptimalkan fungsi pengendalian.

Di sisi lain, terdapat pula beberapa penelitian terdahulu yang memiliki pandangan atau hasil yang berbeda dan tidak sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, terutama yang menyoroti kondisi-kondisi tertentu di mana pengaruh skeptisisme dianggap tidak signifikan atau justru memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Sari (2018) dengan judul *Analisis Skeptisisme Auditor dan Dampaknya Terhadap Hubungan Kerja di Lingkungan Pemerintahan*. Dalam penelitiannya, mereka menemukan bahwa secara statistik skeptisisme tidak berpengaruh signifikan terhadap perbaikan sistem pengendalian intern jika lingkungan kerja organisasi memiliki budaya birokrasi yang kaku dan komunikasi yang buruk. Argumen yang dikemukakan adalah bahwa sikap skeptis yang terlalu tinggi sering disalahartikan oleh pejabat daerah sebagai sikap mencurigai atau menuduh, sehingga menimbulkan resistensi, penolakan informasi, dan hambatan komunikasi. Akibatnya, auditor sulit mendapatkan data yang lengkap, dan rekomendasi perbaikan pengendalian tidak dijalankan dengan baik karena adanya rasa tidak percaya antara pemeriksa dan yang diperiksa. Pandangan ini berbeda dengan hasil penelitian

saat ini yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh konteks sosial dan budaya organisasi. Penelitian ini membuktikan bahwa di Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango, skeptisisme dipahami sebagai bagian dari standar profesi, bukan sikap pribadi, sehingga justru mendorong keterbukaan dan perbaikan, bukan menimbulkan konflik.

Perbedaan pandangan juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2020) yang berjudul *Kompetensi Lebih Dominan Dibandingkan Skeptisisme dalam Pengendalian Keuangan*. Dalam penelitiannya, Prasetyo berpendapat bahwa kemampuan teknis, pengetahuan aturan, dan pengalaman kerja (kompetensi) adalah faktor utama yang memperkuat SPIP, sedangkan sikap skeptis hanya bersifat pelengkap dan tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan jika auditor tidak memahami isi aturan pengendalian. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian saat ini yang menempatkan skeptisisme sebagai faktor yang sangat signifikan dan berpengaruh langsung. Perbedaan ini memberikan wawasan tambahan bahwa kedua faktor tersebut saling melengkapi: kompetensi adalah bekal pengetahuan, sedangkan skeptisisme adalah sikap penerapannya. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun berilmu tinggi, jika tidak memiliki sikap kritis, maka pengendalian intern tetap tidak akan terjaga dengan baik.

Secara keseluruhan, perbandingan dengan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan arus utama pemikiran dan teori akuntansi keuangan sektor publik yang menempatkan skeptisisme profesional sebagai pilar utama keberhasilan pengawasan dan pengendalian. Perbedaan hasil yang ada lebih banyak disebabkan oleh faktor kontekstual seperti budaya organisasi, komunikasi, dan pemahaman akan peran auditor di masing-masing lokasi penelitian. Namun, penelitian ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa dalam konteks pemerintahan daerah yang baik, sikap skeptis yang profesional, objektif, dan berbasis bukti adalah penggerak utama yang menjadikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berjalan efektif, andal, dan mampu menjaga keuangan negara dari risiko kerugian maupun penyalahgunaan wewenang.

Skeptisme Berpengaruh Positif dan Signifikan Teknologi Informasi

Studi ini menunjukkan bahwa skeptisisme memiliki efek yang baik dan signifikan terhadap teknologi informasi. Dengan kata lain, sikap kritis auditor mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih baik untuk membantu proses pengawasan. Hasil ini konsisten dengan Kamal dkk. (2022), yang menunjukkan bahwa skeptisisme membantu memperkuat sistem kontrol internal pemerintah.

Dari sudut pandang teori keagenan, skeptisisme dan penggunaan teknologi informasi dapat dianggap sebagai mekanisme kontrol yang bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara kontraktor dan prinsipal. Sebagai prinsipal dalam hal ini, pemerintah atau organisasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pejabat atau administrator sistem bertindak sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan. Untuk mencegah kontraktor menggunakan sumber daya dan informasi untuk tujuan tertentu, sistem pemantauan yang tepat diperlukan, menurut teori keagenan.

Teknologi Informasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki efek positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian internal pemerintah. Hasil-hasil ini juga menunjukkan bahwa jika teknologi digunakan dengan benar, SPIP (Kebijakan dan Inspeksi Keamanan Negara) dapat bekerja lebih baik. Proses pemantauan yang lebih terorganisir dan data yang lebih akurat dapat dicapai dengan bantuan sistem yang terintegrasi dan andal. Temuan ini konsisten dengan penelitian Pratiwi dkk. (2022) dan Dedet Suyudha (2021), yang juga menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memiliki manfaat besar.

Continuous Auditing Berpengaruh Positif dan Signifikan Secara Tidak Langsung Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Melalui Teknologi Informasi

Studi ini menunjukkan bahwa, melalui penggunaan teknologi informasi sebagai variabel perantara, audit berkelanjutan secara tidak langsung meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah. Ini menunjukkan bahwa audit berkelanjutan tidak hanya memperkuat mekanisme pengendalian tetapi juga mendorong penggunaan teknologi yang lebih terintegrasi untuk membantu pengendalian internal. Audit berkelanjutan meningkatkan efektivitas SPIP (Pengendalian Negara atas Pemerintahan yang Dikelola Secara Internal) dengan memantau data secara real-time. Hasil ini konsisten dengan penelitian oleh Sagara dan Akbar (2021), yang juga menemukan dampak signifikan dan tidak langsung dari audit berkelanjutan terhadap SPIP dengan menggunakan teknologi informasi.

Teori keagenan menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi secara tidak langsung oleh kemampuan untuk menerapkan audit berkelanjutan. Informasi yang akurat dan dapat diandalkan adalah dasar hubungan antara klien, seperti pemerintah atau perusahaan, dan kontraktor yang menangani anggaran dan kebijakan. Oleh karena itu, audit berkelanjutan yang efektif berfungsi sebagai kontrol untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh agen benar, jelas, dan bebas dari kesalahan atau manipulasi.

Skeptisme Berpengaruh Positif dan Signifikan Secara Tidak Langsung Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Melalui Teknologi Informasi

Studi ini menunjukkan bahwa skeptisisme, melalui teknologi informasi sebagai variabel perantara, memiliki efek positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian internal pemerintah. Sikap kritis auditor mendorong evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap data yang dibuat oleh sistem TI, memastikan bahwa data yang digunakan untuk pengambilan keputusan melalui proses pengujian

dan verifikasi yang ketat. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan dan manipulasi yang dapat memengaruhi kebijakan dan pengelolaan anggaran. Hasil ini konsisten dengan penelitian oleh Sagara dan Akbar (2021), yang juga menemukan dampak tidak langsung dan signifikan dari skeptisisme terhadap sistem pengendalian internal pemerintah yang didasarkan pada teknologi informasi. Karena keahlian skeptisisme secara tidak langsung meningkatkan kualitas laporan keuangan, temuan ini juga dapat dijelaskan oleh teori keagenan. Asimetri informasi dapat terjadi dalam hubungan antara kontraktor yang mengelola anggaran dan klien, seperti pemerintah atau perusahaan. Ini dapat terjadi karena perbedaan tingkat akses dan pengetahuan. Dengan mendorong pemeriksaan dan evaluasi data secara menyeluruh, skeptisisme profesional membantu mengurangi risiko ini. Ini memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan tidak diterima begitu saja tanpa verifikasi yang memadai.

E. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa skeptisisme dan audit terus menerus baik untuk sistem pengendalian internal pemerintah dan teknologi informasi. Selain itu, terbukti bahwa TI memengaruhi SPIP. Ini karena kedua variabel tersebut memiliki dampak tidak langsung pada SPIP karena peran TI sebagai variabel mediasi.

Studi ini terbatas pada Otoritas Pengawasan Kabupaten Bone Bolango dan menggunakan variabel tertentu. Oleh karena itu, disarankan agar studi ini mencakup lebih banyak lembaga pemerintah daerah dan mempertimbangkan variabel tambahan seperti kebijakan pengawasan keuangan, budaya organisasi, dan pihak eksternal yang terlibat dalam proses audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, e., rahmawati, d., & arikunto, s. (2010). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. *Jurnal profita*, 6(2), 1–19.
- Arianti, p., & darmayanti, y. (2022). Pengaruh skeptisme profesional dan motivasi kerja terhadap kualitas audit jarak jauh di masa pandemi covid 19 dengan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. *E-jurnal. Bung hatta*, 21(1), 1–4.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2020). *Auditing and assurance services* (17th ed.). Pearson Education.
- Azizah, i., wijayanti, a., & fitrienne, w. (2019). Pengaruh kualitas auditor , skeptisme profesional , *Seminar nasional pakar ke 2 tahun 2019*, 1–6.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall.
- Butar, F., & Perdana, A. (2017). Pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9(2), 145–160.

- Butar, s. G. A. B., & perdana, h. D. (2017). The application of professional skepticism of government internal auditors in detecting fraud (case study on the auditor of bpkp representative of central java province). *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 20(1), 169.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199.
- Dedet suyudha, a. (2021). *Penerapan sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan fidiana fidiana sekolah tinggi ilmu ekonomi indonesia (stiesia) surabaya*. [Www.suarasurabaya.net](http://www.suarasurabaya.net),
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.2307/258191>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.
- Ghozali, i., & latan, h. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. *Semarang: badan penerbit undip*.
- Hair jr, j. F., black, w. C., babin, b. J., & anderson, r. E. (2010). Multivariate data analysis. In *Multivariate data analysis* (p. 785).
- Hartono, J., & Sari, R. (2018). Analisis skeptisisme auditor dan dampaknya terhadap hubungan kerja di lingkungan pemerintahan. *Jurnal Tata Kelola Keuangan*, 4(1), 23–35.
- Indriyanto, e. (2023). The role of information technology in increasing audit process efficiency under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license (cc by-nc 4.0). *Jurnal ekonomi*, 12(04), 2023. [Http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/ekonomi](http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/ekonomi)
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kamal, a., akuntansi, □, tinggi, s., tri, i. E., & nusantara, d. (2022). Yume : journal of management teknologi informasi dan skeptisisme profesional terhadap fraud detection skills auditor internal pemerintah. *Yume : journal of management*, 5(2), 295–313.
- Kusuma, m. H., firmansyah, a., trisakti, u., pembangunan, u., & veteran, n. (2024). *Strategi peningkatan kapabilitas apip untuk optimalisasi pencegahan korupsi di indonesia*. 4(4), 433–446.
- Marita kusuma wardani. (2019). *The effectiveness of internal control system and role of internal audit on local government performance*. 11(1), 114–124. <https://www.neliti.com/publications/424827/the-effectiveness-of-internal-control-system-and-role-of-internal-audit-on-local>
- Mene, r. E., karamoy, h., & warongan, j. D. . (2018). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten halmahera utara. *Going concern : jurnal riset akuntansi*, 13(04), 133–143. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20045.2018>

- Otley, D. (1999). Performance management: A framework for analysis. *Management Accounting Research*, 10(4), 363–382.
- Pratiwi, m. E., din, m., masdar, r., amir, a. M., zahra, f., kahar, a., & meldawati, l. (2022). Utilization of information technology to increase human resources capacity and internal control systems on local government financial reporting information. *Universal journal of accounting and finance*, 10(1), 191–199. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100120>
- Prasetyo, B. (2020). Kompetensi lebih dominan dibandingkan skeptisisme dalam pengendalian keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(1), 45–58.
- Safitri, d. (2014). Pengaruh independensi auditor dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening. *Jurnal ilmiah ekonomi dan bisnis*, 11(2), 339–351.
- Sagara, y., & akbar, f. (2021). Continuous monitoring and continuous auditing implementation in Indonesian higher education. *Jurnal akuntansi & auditing indonesia*, 25(2), 152–160. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss2.art5>
- Sekaran, uma & bougie roger. (2013). Research methods for business: a skill-building approach. *Leadership & organization development journal*, 34(7), 700–701. <https://doi.org/10.1108/lodj-06-2013-0079>
- Sikumbang, m., pakaya, l., & blongkod, h. (2020). Pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sdm, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan studi pada opd provinsi Gorontalo. *Jambura accounting review*, 1(1), 36–47. <https://doi.org/10.37905/jar.v1i1.8>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif*.